

LEASES - CASES

**PEMAKAIAN METODE LEASE (sewa guna usaha)
UNTUK MENENTUKAN
NILAI PABEAN BARANG IMPOR SEMENTARA
PADA BIDANG AUDIT KANTOR WILAYAH VII
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SURABAYA**

(KASUS PADA PT. "X" SIDOARJO)

KK
A 07 / 03

Bro
P

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH :
CATUR HERU BROTO
NO.Pokok :049922969-E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

SKRIPSI
PEMAKAIAN METODE LEASE (sewa guna usaha)
UNTUK MENENTUKAN
NILAI PABEAN BARANG IMPOR SEMENTARA
PADA BIDANG AUDIT KANTOR WILAYAH VII
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SURABAYA
(KASUS PADA PT ., X., SIDOARJO)

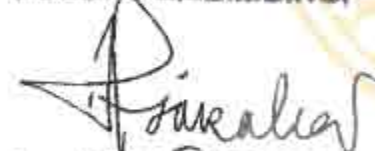
DIAJUKAN OLEH :

CATUR HERU BROTO

No. Pokok : 049922969-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



DR. HERU TJARAKA, Msi, AK
NIP. 132054304



TANGGAL : 13 - 3 - 2003

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



DR. M. SUYUNUS, MAFIS., AK
NIP. 131287542

TANGGAL : 14 - 3 - 2003

Surabaya 29 - 11 - 2002

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. Heru Tjaraka, MSi, Ak
NIP. 132054304

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1995 tanggal 31 Desember 1995 tentang kepabeanan, terjadi perubahan di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai dalam menetapkan nilai pabean barang impor, yaitu dari sistem *Cost Insurance Freight (CIF)* menjadi enam metode penetapan nilai pabean berdasarkan prinsip article VII GATT yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya yaitu : Metode satu berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, metode dua berdasarkan nilai transaksi barang identik, metode tiga berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa, metode empat berdasarkan metode deduktif, metode lima berdasarkan metode komputasi, dan, metode enam berdasarkan harga yang tersedia di daerah pabean.

Namun demikian tidak semua transaksi perdagangan impor bisa dikategorikan sebagai suatu transaksi jual beli sehingga dengan mudah bisa ditentukan nilai pabeannya. *Barang Impor Sementara atau barang Lease* (sewa guna usaha) merupakan salah satu transaksi perdagangan impor yang bukan suatu transaksi jual beli. Sehingga dalam penentuan nilai pabeannya tidak bisa menggunakan metode satu berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, tapi harus menggunakan metode dua sampai enam dengan mengambil nilai pabean yang tersedia di daerah pabean sehingga nilai pabeannya menjadi tidak realitas, tidak fair dan memungkinkan timbulnya pertentangan diantara bea dan cukai dan bagi pihak *lessee* selaku importir.

Nilai pabean barang impor sementara yang tersedia di daerah pabean atau berdasarkan metode enam yang selanjut ini dipakai adalah nilai pabean hasil penetapan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan metode *self assessment* dan atau berdasarkan rumus yang dikembangkan oleh WTO. Kedua nilai ini tidak mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang akan dibayar oleh perusahaan tapi berdasarkan suatu asumsi dan personal judgment sehingga nilai pabean yang akan ditetapkan oleh masing-masing aparat bea dan cukai akan berbeda-beda untuk barang yang sama. Perbedaan ini bisa dihindari bila dalam penetapannya bea dan cukai memakai pembiayaan yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh/menggunakan barang impor tersebut, yaitu dengan menggunakan metode *operating lease* yang dipakai oleh perusahaan itu sendiri. Dari hasil penelitian dan perbandingan antara metode *operating lease* yang dipakai perusahaan dengan metode *self assessment* dan dengan rumus yang dikembangkan oleh WTO, metode *operating lease* yang dipergunakan oleh perusahaan menghasilkan nilai pabean yang paling tinggi. Pemakaian metode ini terbukti sejalan dengan metode satu harga transaksi dan memberikan nilai pabean yang paling menguntungkan bagi bea dan cukai dibanding dengan nilai pabean yang diperoleh berdasarkan asas *self assessment* dan rumus yang dikembangkan oleh World Trade Organisation untuk aplikasi metode VI article VII GATT.